

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, banyak literatur yang digunakan oleh penulis sebagai bahan bacaan untuk memahami materi terkait tema penelitian seperti buku, jurnal, skripsi, tesis, dan lain sebagainya. Berbagai literatur tersebut digunakan guna membantu proses penyelesaian penelitian. Sejumlah penelitian mengenai diplomasi budaya Jepang telah dilakukan seperti artikel jurnal “Efektifitas Diplomasi Budaya Dalam Penyebaran Anime Dan Manga Sebagai National Branding Jepang” karya Caraka Wahyu Erwindo. Fokus pembahasan jurnal ini yaitu terkait efektifitas diplomasi budaya dalam penyebaran manga dan anime sebagai national branding negara Jepang.¹

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan karya Caraka Wahyu Erwindo di atas adalah terletak pada fokus pembahasannya, yaitu penulis berfokus terkait dengan bagaimana peran diplomasi budaya yang dilakukan Jepang melalui serial manga dan anime di Indonesia serta bagaimana dampak, pengaruhnya, dan hambatan untuk melakukan diplomasi tersebut.

Kedua, skripsi Rinda Choiriyah yang berjudul “Kepentingan Diplomasi Jepang di Indonesia dalam Momentum Peringatan Tahun Emas Diplomatik Indonesia-Jepang”. Skripsi tersebut lebih mengutamakan pada bagaimana agenda acara satu tahun pada peringatan Tahun Emas Hubungan Diplomatik Indonesia dengan Jepang. Serta kepentingan diplomasi kebudayaan Jepang dalam momentum peringatan tersebut. Peneliti tidak membahas dampak dari diplomasi kebudayaan Jepang di Indonesia. Pada penelitian ini dituliskan bahwa pada tahun 2008 merupakan Tahun Emas Hubungan Persahabatan antara Indonesia-Jepang.

Dalam peringatan ini Jepang menggunakan pendekatan diplomasi kebudayaan untuk mencapai kepentingan nasional negaranya. Penelitian tersebut berusaha menemukan kepentingan Jepang untuk meningkatkan hubungan persahabatan

¹ Caraka Wahyu Erwindo. (2018). Efektifitas Diplomasi Budaya Dalam Penyebaran Anime Dan Manga Sebagai Nation Branding Jepang. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, Vol. 7 No. 2.

dengan Indonesia. Selain itu Jepang ingin mengubah citra buruk dimasa lalu semasa kekejaman penjajah atas Indonesia. Konsep yang dipakai dalam tulisan tersebut adalah konsep diplomasi kebudayaan, konsep kepentingan nasional, dan konsep multy-track diplomacy.² Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan penelitian Rinda Choiriyah di atas adalah terletak pada waktu penelitiannya dan juga fokus penelitiannya, yang dimana penulis lebih berfokus kepada peran dari diplomasi budaya Jepang melalui serial manga dan anime itu sendiri guna meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia.

Ketiga, Jurnal Analisis Hubungan Internasional karya Okky Gilang Matahari yang berjudul “Analisis Implementasi Strategi Diplomasi Budaya Populer Jepang di Indonesia Tahun 2008-2013”. Di dalam jurnal tersebut dijabarkan mengenai masa resesi ekonomi Jepang (bubble economy), diperparah dengan krisis ekonomi pada tahun 2008 yang menimpa dunia internasional. Akibatnya, Jepang mengubah haluan praktik diplomasi nya yang semula berlandas ekonomi menjadi diplomasi budaya. Sebelumnya, Jepang telah mencoba mengaplikasikan kebijakan Cool Japan-nya pada negara-negara lain, tetapi tidak terlalu maksimal dalam implementasinya. Pada tahun 2008 merupakan peringatan hubungan diplomatik Indonesia-Jepang ke-50 tahun, diambil sebagai momen aplikasi diplomasi budaya Jepang dengan menggelar pameran budaya seperti festival tradisional, festival musik dan lain-lain selama setahun penuh.

Disebutkan bahwa banyak daya tarik Indonesia sehingga dijadikan target pasar bagi Jepang, seperti usia produktifnya yang cocok untuk dilakukan diplomasi budaya, sumber daya alam dan penerimaan yang baik atas budaya tradisional dan populer Jepang yang masuk ke Indonesia. Dengan begitu, ini adalah pilihan rasional atas permasalahan yang dialami Jepang dengan aktif melakukan promosi dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan bersifat kebudayaan, seperti Little Tokyo Ennichisai, konser musik Jepang dan Jak-Japan Matsuri. Di dalam jurnal ini dijelaskan secara komprehensif alasan Jepang tertarik dengan Indonesia melalui

² Rinda Choiriyah. (2010). *Kepentingan Diplomasi Jepang di Indonesia dalam Momentum Peringatan Tahun Emas Diplomatik Indonesia-Jepang periode 2008*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang.

diplomasi kebudayaan. Perbedaan dengan penelitian penulis, yakni lebih berfokus kepada peran diplomasi budayanya guna meningkatkan hubungan bilateral antar kedua negara yaitu Jepang dan Indonesia.³

Keempat, artikel jurnal karya Syamsul Hadi yang berjudul “Japanese Diplomacy in ASEAN and Its Relevance to Indonesia”. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa ketertarikan Jepang untuk memperluas koneksinya terhadap kawasan Asia tenggara yang dihuni salah satunya oleh Indonesia. Ketertarikan Jepang terhadap kawasan Asia Tenggara dimulai setelah pembentukan ODA (Official Development Assistance) yang memberikan bantuan kepada negara-negara lain, termasuk ASEAN.

Indonesia merupakan negara penerima distribusi yang cukup besar. Alasan tertentu berdasarkan jurnal ini terletak pada ketertarikan Jepang terhadap Indonesia sebagai negara yang strategis dan memiliki kepadatan penduduk yang bagus untuk kegiatan ekonomi. Keterkaitan Jepang-Indonesia akan sumber daya alam untuk kebutuhan industri Jepang juga membuat negara tersebut enggan melepaskan Indonesia, sehingga dengan bantuan promosi budaya tradisional dan populer dapat membuat ketergantungan Indonesia terhadap Jepang semakin intens.⁴

Kelima, artikel jurnal karya Matahari Adihapsari Saiful Bahri & Hindah Muchtamilatur Rochmah yang berjudul: “Diplomasi Budaya Anime Sebagai Soft-Power Jepang Guna Membangun Citra Positif Negara”. Pada artikel jurnal ini dibahas mengenai bagaimana negara Jepang berupaya untuk membangun kembali citra positif negara nya terkhusus pasca perang dunia ke 2.⁵

Adapun perbedaannya dengan tulisan yang ditulis oleh penulis adalah terletak pada fokus pembahasannya, yang dimana penulis lebih berfokus kepada peran dari diplomasi budaya Jepang itu sendiri dengan menggunakan serial manga dan anime sebagai sarannya.

³ Okky Gilang Matahari. (2014). *Analisis Implementasi Strategi Diplomasi Budaya Populer Jepang di Indonesia tahun 2008-2013*. Jurnal Analisis Hubungan Internasional Vol. 3, No. 2

⁴ Syamsul Hadi. (2010). *Japanese Diplomacy in ASEAN and It's Relevance to Indonesia*. Understanding Contemporary: Japan. Hal: 45-46

⁵ Matahari A. S. B & Hindah M. R. (2020). *Diplomasi Budaya Anime Sebagai Soft-Power Jepang Guna Membangun Citra Positif Negara*. Jurnal Global & Policy Vol.8, No.3.

Keenam, skripsi karya Muhammad Revinsyah yang berjudul: “Diplomasi Budaya Jepang terhadap Indonesia melalui Anime: Kimi no Na wa”. Pada skripsi ini, fokus pembahasannya adalah tertitik kepada salah satu serial anime Kimi no Na wa yang dimana didalam serial tersebut mengandung unsur-unsur diplomasi didalam nya.⁶

Adapun perbedaannya dengan tulisan penulis ini adalah terletak pada fokus pembahasannya, yang dimana tulisan penulis tidak hanya berfokus kepada salah satu contoh serial anime saja, tetapi juga contoh serial manganya.

Ketujuh, skripsi karya M. Hadi Sururin yang berjudul: “Diplomasi Budaya Jepang di Indonesia melalui Manga dan Anime. Pada skripsi ini dibahas mengenai bagaimana diplomasi itu dijalankan oleh Jepang terhadap Indonesia dengan menggunakan serial Manga dan Anime.⁷

Adapun perbedaannya dengan karya penulis adalah terletak pada waktu penelitiannya, yang dimana peneliti terdahulu melakukan penelitiannya pada tahun 2014, sedangkan penulis melakukan penelitiannya pada tahun 2021. Lalu adapun juga persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis sekarang adalah sama-sama membahas tentang diplomasi Jepang terhadap Indonesia melalui serial Manga dan Anime.

Terakhir, skripsi karya Zeptira Wukirasih Primustika yang berjudul: “Diplomasi Budaya Jepang terhadap Indonesia: Studi Kasus Cosplay”. Pada skripsi ini membahas tentang bagaimana cosplay yang notabene pengenalan costum dan juga budaya Jepang dijadikan sebagai alat diplomasi oleh Jepang.⁸

Adapun yang membedakannya dengan tulisan penulis adalah terletak pada media atau alat diplomasi yang dilakukan oleh Jepang itu sendiri, yang dimana skripsi tersebut menggunakan studi kasus cosplay sebagai fokus pembahasannya, sedangkan penulis menggunakan serial manga dan anime sebagai studinya.

⁶ Muhammad Revinsyah. (2018). *Diplomasi Budaya Jepang terhadap Indonesia melalui Anime: Kimi no Na wa*. Skripsi Universitas Katolik Parahyangan.

⁷ M. Hadi Sururin. (2014). *Diplomasi Budaya Jepang di Indonesia melalui Manga dan Anime*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang.

⁸ Zeptira Wukirasih Primustika. (2019). *Diplomasi Budaya Jepang terhadap Indonesia: Studi Kasus Cosplay*. Skripsi Universitas Kristen Indonesia.

2.2 Landasan Teori

Sejumlah konsep digunakan dalam penelitian Peran Diplomasi Budaya Jepang melalui Serial Manga dan Anime terhadap Hubungan Bilateral dengan Indonesia Pada Tahun 2016-2021. Konsep yang akan digunakan dalam menganalisa pokok masalah adalah konsep diplomasi budaya, soft power, diplomasi multi track, dan konsep hubungan bilateral yang akan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

2.2.1 Pengertian Diplomasi

Secara umum diplomasi didefinisikan sebagai seni dalam kegiatan negosiasi atau perundingan yang dilakukan oleh seorang diplomat dengan pihak lain yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Diplomasi juga sangat erat hubungannya dengan kegiatan politik luar negeri dan hubungan internasional dengan negara lain.

Menurut Sir Ernest Satow *Diplomacy is the application of intelligence and tact to the conduct of official relations between governments of independent states.* Yang bermakna diplomasi adalah penggunaan dari kecerdasan dan kebijaksanaan untuk melakukan hubungan resmi antar pemerintah negara-negara merdeka. Kadang-kadang juga dilakukan dalam hubungan negara- negara pengikutnya atau lebih singkat lagi, pelaksanaan urusan tersebut dilakukan antara negara-negara dengan cara damai.

Sementara itu Ian Brownlie menyatakan bahwa diplomasi merupakan setiap cara yang diambil untuk mengadakan dan membina hubungan dan berkomunikasi satu sama lain atau melaksanakan transaksi politik maupun hukum yang didalam setiap hal dilakukan melalui wakil- wakilnya yang mendapat otorisasi. Pakar lainnya, R.P Barston, menyatakan bahwa diplomasi itu menyangkut pengelolaan dari hubungan-hubungan antar negara termasuk hubungan negara-negara dengan pelaku- pelaku lainnya. Selanjutnya Ivo D. Duchacek mengatakan bahwa

diplomasi biasanya didefinisikan sebagai praktek pelaksanaan politik luar negeri suatu negara dengan cara negosiasi dengan negara lain.⁹

Pengertian lain diplomasi dibesitikan oleh Hans J. Morgenthau yang mengatakan *diplomacy is the promotion of the national interest by peaceful means*. Morgenthau juga memberikan arti diplomasi dalam arti luas dan arti sempit:

a) Pengertian dalam arti luas

Diplomacy is formation and execution of foreign policy on all levels, the highest as well as the sub-ordinate. (Diplomasi adalah pembentukan dan pelaksanaan politik luar negeri dalam segala tingkatnya, dari yang tertinggi hingga yang terendah). Jadi dalam hal ini menyangkut perumusan dan pelaksanaan politik luar negeri dalam segala tingkatnya.¹⁰

b) Pengertian dalam arti sempit

Diplomasi adalah suatu medium, channel, atau cara dimana hubungan resmi antara pemerintah itu terjadi.

Pada umumnya terdapat dua jenis diplomasi yakni *track one diplomacy* dan *track two diplomacy*. Jalur pertama disebut juga sebagai diplomasi yang dilakukan para pejabat pemerintah yang berhubungan dengan para pejabat pemerintah lainnya. Jenis diplomasi ini sangat tergantung kepada kekuasaan politik. Diplomasi jenis ini lebih banyak terlibat dalam apa yang disebut *power politics* dalam hubungan internasional.

Dalam diplomasi seperti ini diplomat adalah perpanjangan dari lembaga eksekutif. Para diplomat akan mewakili pemerintahannya sehingga dia juga akan melakukan perundingan atau pertemuan serah pernyataan sikapnya sesuai dengan sikap pemerintahannya. Oleh karena itu diplomasi track one ini biasanya berlangsung formal, kaku dan penuh dengan protokoler.

Jenis diplomasi lainnya disebut sebagai *second track diplomacy* yang dilakukan diplomat non pemerintah. Biasanya perundingan berlangsung secara informal dan tidak mewakili pemerintahan meskipun bisa saja para pejabat dan pejabat senior

⁹ Asep Setiawan, Endang Sulastri. (2017) *Pengantar Studi Politik Luar Negeri*. Jakarta: UM Press. Hal: 76-77.

¹⁰ Asep Setiawan, Endang Sulastri. (2017). *Pengantar Studi Politik Luar Negeri*. Jakarta: UM Press. Hal: 78-79.

hadir dalam pertemuan tersebut. Pada umumnya second track diplomacy dilakukan untuk mencari solusi dari kebekuan pada first track diplomacy.

Inti dari diplomasi adalah kesediaan untuk memberi dan menerima guna mencapai saling pengertian antara dua negara (bilateral) atau beberapa negara (multilateral). Diplomasi biasanya dilakukan secara resmi antar pemerintah negara, namun bisa juga secara tidak resmi melalui antar lembaga informal atau antar penduduk atau antar komunitas dari berbagai negara yang berbeda. Idealnya, diplomasi harus memberikan hasil berupa pengertian yang lebih baik atau persetujuan tentang suatu masalah yang dirundingkan.

Ada berbagai ragam diplomasi, yaitu:¹¹

- a. Diplomasi Boejuis-Sipil, merupakan diplomasi yang dalam penyelesaian permasalahan lebih mengutamakan cara-cara damai melalui negosiasi untuk mencapai tujuan (win-win solution)
- b. Diplomasi demokratis, yaitu diplomasi yang berlangsung secara terbuka dan memperhatikan suara rakyat.
- c. Diplomasi totaliter, merupakan diplomasi yang lebih menonjolkan peningkatan peran negara (pemujaan patriotism dan loyalitas kepada negara berapa pun harga pengorbanannya). Diplomasi ini marak pada fasisme Italia, fasisme Spanyol, dan nazi Jerman.
- d. Diplomasi Preventif, biasanya diluncurkan ketika masyarakat menghadapi suasana genting yang akan memunculkan konflik besar atau pecah perang.
- e. Diplomasi Provokatif, bertujuan untuk menyudutkan posisi suatu negara untuk menimbulkan sikap masyarakat internasional agar menentang politik suatu negara.
- f. Diplomasi Perjuangan, diperlukan saat negara menghadapi situasi genting untuk mempertahankan posisinya dalam memperjuangkan hak-hak untuk mengatur urusan dalam negerinya dan menghindari campur tangan negara lain.

¹¹ Shoelhi Mohammad. (2011). *Diplomasi: Praktek Komunikasi Internasional*. Bandung: Sembiosa Rekatama Media. Hal: 7

- g. Diplomasi Multilajur (Multitrack Diplomasi), merupakan diplomasi total yang dilakukan Indonesia dimana penggunaan seluruh upaya pada aktor dalam pelaksanaan politik luar negeri.
- h. Diplomasi Publik (Softpower Diplomacy), diplomasi ini menekankan gagasan alternatif penyelesaian masalah melalui pesan-pesan damai, bukan melalui provokasi, agitasi atau sinisme.

Diplomasi pada dasarnya adalah kegiatan politik dan, dengan sumber daya yang lengkap dan terampil, sumber utama kekuasaan. Tujuan utamanya adalah untuk memungkinkan negara-negara mengamankan tujuan kebijakan luar negeri mereka tanpa menggunakan kekuatan, propaganda, atau hukum. Tujuan ini dicapai terutama dengan komunikasi antara lembaga diplomatik profesional dan pejabat lain yang dirancang untuk menangani perjanjian.¹²

Dalam praktiknya, diplomasi terdiri dari tiga kegiatan utama yaitu, yang pertama kegiatan komunikasi. Komunikasi adalah inti dari proses diplomatik. Komunikasi dilakukan untuk memastikan pesan disampaikan dengan cara yang dimaksud, maka untuk mencapai hal tersebut, kemampuan berkomunikasi sangat penting baik dalam istilah teknis melalui bahasa dan simbol yang sesuai, maupun secara emosional dengan sesama manusia. Kedua, Representasi. Representasi dalam diplomasi adalah tentang kelompok atau individu dalam hal ini biasa disebut diplomat yang mewakili dan berkomunikasi atas nama konstituensi, baik lokal maupun negara, ketika terlalu banyak suara berisiko pesan yang diartikulasikan dengan buruk. Dalam pemahaman klasik, ini berarti memiliki dukungan negara, sehingga seorang diplomat dapat membedakannya dari orang lain yang mengadopsi istilah „diplomat“ atau „duta besar“. Ketiga, Negosiasi. Negosiasi adalah diskusi, atau percakapan, yang terjadi antara mereka yang mewakili posisi tertentu dengan pandangan untuk mencapai kesepakatan, bahkan jika perjanjian adalah untuk terus bernegosiasi.¹³

¹² G.R. Berridge. (2015). *Diplomacy Theory and Practice*. London: Palgrave Macmillan. Hal: 1.

¹³ Alison R. Holmes and J. Simon Rofe. (2015). *Global Diplomacy: Theories, Types, and Models*. Boulder: Westview. Hal: 22.

2.2.2 Multi Track Diplomacy

Dalam perkembangan selanjutnya muncul pula apa yang disebut multi track diplomacy. Dalam gambar berikut diperlihatkan bahwa multi track bisa melingkupi semua aspek kehidupan sebuah bangsa. Diplomasi tidak hanya dilakukan para pejabat tapi juga seniman dan akademisi serta pengusaha.¹⁴

Gambar 1 Multi-Track Diplomacy



Istilah Multi Track Diplomacy (MTD) merupakan kerangka konseptual yang didesain sedemikian rupa untuk merefleksikan aktivitas yang bertujuan mewujudkan perdamaian. Munculnya aktor-aktor dalam MTD ini merupakan perluasan dari track pertama, yakni negara. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, banyak penstudi baru dalam Ilmu Hubungan Internasional yang beranggapan bahwa aktor dalam Hubungan Internasional hanyalah presiden, duta

¹⁴ Asep Setiawan, Endang Sulastri. (2017) *Pengantar Studi Politik Luar Negeri*. Jakarta: UM Press. Hal: 87-89.

besar, menteri luar negeri dan representasi negara lainnya. Namun, pada kenyataannya aktor dalam Hubungan Internasional itu sangatlah beragam.¹⁵

Berdasarkan perkembangan itu, para akademisi hubungan internasional merumuskan konsep Multi Track Diplomacy yang terdiri dari sembilan aktor atau jalur diplomasi dengan memiliki fungsi dan karakteristik masing-masing dalam mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan bagi masyarakat dunia. Beberapa track yang akan dibahas dalam buku ini di antaranya adalah:

1. Track One Diplomacy: Government

Dalam track atau jalur pemerintahan ini, segala upaya conflict resolution akan dilakukan melalui jalur formal dan oleh pemerintah serta lembaga-lembaga yang melekat pada sebuah negara. Baik yang berasal dari eksekutif, legislatif dan yudikatif.

2. Non-government/professional or Peace making through Conflict Resolution

Dalam usahanya mewujudkan resolusi konflik, kelompok non-pemerintah atau kalangan profesional juga memiliki fungsi mewujudkan kondisi yang damai. Adapun upaya yang dilakukannya bersifat preventif, penyelesaian, dan menjaga hubungan antar negara yang dilakukan oleh kelompok non-state actors.

3. Business or Peace-making through Commerce

Kelompok bisnis juga memiliki peran penting dalam upayanya mewujudkan perdamaian. Yakni melalui penyediaan kesempatan untuk melakukan kegiatan bisnis kepada masyarakat. Sehingga, dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat mengurangi kesenjangan ekonomi yang terjadi di antara masyarakat.

4. Private Citizen, or Peace-making through Personal Involvement.

Track ini meliputi kegiatan yang dilakukan oleh para individu atau masyarakat dalam mewujudkan perdamaian di dunia. Keterlibatan kelompok ini juga sering disebut sebagai “citizen diplomacy” dengan berbagai jenis kegiatan, misalnya program pertukaran pemuda, kelompok volunteer, non-government organization

¹⁵ Dadang, I & Frisca, A. (2019) *Multi Track Diplomacy: Teori dan Studi Kasus*. Mulawarman University Press. Hal: 1-2

serta kelompok-kelompok kepentingan lainnya yang diisi oleh masyarakat yang memiliki visi dan misi yang sama dalam mewujudkan perdamaian.¹⁶

5. Research, Training and Education or Peace-making through Learning.

Pada track yang kelima ini, aktor yang terlibat sangat erat kaitannya dengan kalangan akademisi dan peneliti. Mereka memiliki tiga pekerjaan yang terhubung satu sama lain, di antaranya:

- 1) Penelitian yang terdiri dari akademisi di perguruan tinggi dan kelompok think tanks.
- 2) Pelatihan yang menasar kelompok masyarakat tertentu dengan pembelajaran mengenai teknik-teknik bernegosiasi, diplomasi, mediasi, resolusi konflik serta menjadi pihak ketiga dalam upaya penyelesaian masalah misalnya sebagai fasilitator; kemudian
- 3) Pendidikan, yakni melalui penyelenggaraan program pendidikan mulai dari taman kanak-kanak sampai pada jenjang perguruan tinggi dengan menyajikan kurikulum yang fokus pada upaya mewujudkan rasa saling toleransi dan penghargaan terhadap HAM (Hak Asasi Manusia).

6. Activism, or Peacemaking through Advocacy

Dalam track ini, aktor yang berperan dalam mewujudkan perdamaian adalah mereka yang memperjuangkan hak-hak masyarakat dalam bidang tertentu, misalnya para aktivis lingkungan, pejuang HAM, pejuang kesetaraan hukum dan gender, serta berbagai kelompok pejuang lainnya. Kelompok ini juga memiliki taktik khusus dalam memperjuangkan keinginan-keinginan yang dimilikinya, yakni melalui advokasi.¹⁷

7. Religious, or Peacemaking through Faith in Action.

Para pemuka agama yang berada di banyak negara, secara umum mungkin hanya terlihat berperan sebagai pengayom bagi masyarakat yang menganut agama yang sama dengan para pemuka agama tersebut. Namun dalam MTD, para pemuka memiliki peran yang lebih besar dari sekedar pengayom umatnya saja. Para pemuka

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Dadang, I & Frisca, A. (2019). *Multi Track Diplomacy: Teori dan Studi Kasus*. Mulawarman University Press. Hal: 7-9.

agama sebagaimana yang kita ketahui memiliki pengikut yang sangat besar, sehingga suara yang dimilikinya pasti didengar oleh pengikutnya. Sehingga dalam MTD, pemuka agama memiliki peran yang krusial dalam mewujudkan perdamaian, terutama bagi konflik-konflik komunal yang terjadi di dalam sebuah negara. Dalam pembahasan selanjutnya kita akan melihat bagaimana pemuka agama berperan dalam mereduksi konflik yang terjadi di dalam sebuah negara.

8. Funding or Peace-making through Providing Resources.

Kelompok ini dapat dikategorikan sebagai kelompok penyedia dana dan banyak dihubungkan dengan para filantropis yang bertugas untuk memfasilitasi track atau aktor-aktor yang berjuang dalam mewujudkan perdamaian. Banyak di antara para lembaga donor ini juga aktif bekerjasama dengan para kelompok masyarakat dalam memperjuangkan isu-isu tertentu. Misalnya isu lingkungan hidup, HAM, dan kesetaraan gender.

9. Communications and the Media or Peacemaking through Information.

Sebagai track terakhir, peran media dalam mewujudkan perdamaian sangatlah penting. Media ibarat sebuah koin, memiliki 2 sisi, yakni sisi baik dan buruk. Media di tangan seorang yang mencintai perdamaian akan memproduksi konten-konten yang memperjuangkan perdamaian. Namun, apabila media berada di tangan seorang yang menyukai pertikaian, maka media cenderung dipenuhi dengan provokasi. Apalagi di saat sekarang, kemajuan teknologi informasi dan informatika menjadikan media dapat mudah diakses dimanapun dan kapanpun. Oleh karena itu, media memiliki peran yang sangat signifikan dalam menentukan damai tidaknya sebuah negara atau wilayah. Lalu tidak dapat dipungkiri juga media adalah sarana penyambung lidah masyarakat sehingga media digunakan untuk menyampaikan pendapat, masukan, atau kritikan yang ditujukan kepada kelompok-kelompok tertentu serta pemerintah. Ada beberapa tipe media yang akan kita bahas dalam pembahasan berikutnya, di antaranya adalah media cetak, film, video, elektronik dll.¹⁸

¹⁸ Ibid

2.2.3 Diplomasi Budaya

Diplomasi kebudayaan didefinisikan oleh Richard T. Arndt, dalam bukunya *The First Resort of King: American Cultural Diplomacy in Twentieth Century*. Richard. T. Arndt mengatakan bahwa diplomasi budaya merupakan cara yang efektif untuk mendapatkan pengaruh dan hasil dalam hubungan internasional antar negara. Dalam penelitiannya Arndt membuktikan bahwa diplomasi budaya dapat membantu menciptakan dasar kepercayaan dengan orang lain, dalam hal ini para pembuat kebijakan untuk mencapai kesepakatan politik, ekonomi, militer.

Dalam buku yang berjudul *Full Spectrum Diplomacy and Grand Strategy Reforming the Structure and Culture of U.S. Foreign Policy*, Lenzowski menjelaskan bahwa diplomasi kebudayaan merupakan upaya untuk mempengaruhi opini publik dengan menggunakan berbagai elemen kebudayaan. Elemen – elemen yang dimaksud meliputi seni, pendidikan, ide, sejarah, ilmu pengetahuan, teknologi, agama, adat istiadat, tata krama, olahraga, bahasa dan lain– lain. Dengan pemanfaatan elemen – elemen kebudayaan tersebut akan memberi dampak positif dalam proses memperjuangkan kepentingan nasional.

Diplomasi kebudayaan sebagai bagian dari diplomasi publik menekankan gagasan alternatif yang bersifat lebih persuasif atau mengajak dibandingkan dengan koersif yang menggunakan kekerasan. Diplomasi ini bertujuan untuk menumbuhkan opini masyarakat yang positif dari negara lain melalui interaksi-interaksi, oleh karenanya diplomasi ini menuntut adanya komunikasi terhadap masyarakat dalam persoalan-persoalan politik luar negeri.¹⁹ Di awal berkembangnya konsep diplomasi kebudayaan, ia digunakan sebagai instrumen untuk implementasi ide-ide yang bertujuan memanfaatkan budaya sebagai promosi pencapaian kebijakan luar negeri.²⁰

Penerapan dari diplomasi kebudayaan ini sudah berlangsung selama Perang Dunia I, di mana diplomat pada masa tersebut memiliki misi diplomatik yang bersifat memanfaatkan budaya. US Department State juga menjadikan kajian

¹⁹ Djelantik, Sukawarsini. (2008). *Diplomasi Antara Teori dan Praktek*. Graha Ilmu, Yogyakarta. Hal 213.

²⁰ Erik Pajtinka. (2014). *Cultural Diplomacy in Theory and Practice of Contemporary International Relations*. Jurnal Belianium, Matej Bel University Press, Vol. XVII. Hal 96-97.

tersebut sebagai salah satu bagian dalam pengembangannya, sebabnya Division of Cultural Relations terbentuk. Hal ini dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat F. D. Roosevelt, untuk mempromosikan pembangunan hubungan kebudayaan dengan Amerika Latin dan menekan penyebaran pengaruh fasisme dalam kawasan. Keadaan tersebut semakin membuat kebudayaan dipandang sebagai sebuah instrumen yang memiliki peran signifikan.

Definisi dari diplomasi budaya memiliki arti yang rumit untuk dicerna, oleh karenanya konsep tersebut harus dipilah kata-perkata untuk dapat memahami arti dari diplomasi kebudayaan tersebut. Budaya atau culture ialah “Seperangkat material khusus, intelektual dan emosional dari masyarakat atau grup sosial yang meliputi seni, literatur, gaya berkehidupan, cara berkehidupan bersama, sistem nilai, tradisi dan kepercayaan”.²¹ Sedangkan pengertian diplomasi, berkaitan dengan tujuan pencapaian kebijakan luar negeri dengan melakukan hubungan diplomatik dengan pihak lainnya, sehingga salah satu arti dari diplomasi kebudayaan yang dapat disimpulkan ialah sebuah instrumen untuk implementasi kebijakan luar negeri suatu negara dengan arti perdamaian. Disebutkan pula oleh diplomat Jerman, A. Enders di mana diplomasi kebudayaan sebagai wadah untuk menjalankan tujuan politik.²² Kemudian, definisi diplomasi kebudayaan oleh Milton Cumming, ialah pertukaran ide-ide, informasi, seni dan aspek-aspek lain dari budaya diantara bangsa-bangsa dan masyarakat serta manusia untuk mendorong rasa saling pengertian.²³

Diplomasi budaya tidak bisa lepas dari istilah diplomasi publik dan soft power. Istilah soft power sendiri yang dikemukakan oleh Joseph Nye, bisa diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi aktor lain untuk mendapatkan kepentingannya dengan memanfaatkan daya tarik dibanding kekerasan atau militer.²⁴ Di sini dapat disimpulkan bahwa soft power ialah kekuatan daya tarik yang dimiliki negara, sehingga dapat dikatakan bahwa diplomasi budaya

²¹ Ibid, hal 99-100.

²² Ibid.

²³ John Lenczowski. (2011). *Full Spectrum Diplomacy and Grand Strategy: Reforming The Structure and Culture of US Foreign Policy*. Lexington Books: United Kingdom. Hal 159.

²⁴ Liang Xu. (2014). *Cultural Diplomacy and Social Capital in China*. United Kingdom, Lancaster University. Hal 1.

merupakan salah satu strategi negara yang efektif dengan biaya murah, sebab hanya mengandalkan daya tarik. Tidak seperti hard power yang didominasi oleh kekuatan militer bersifat high politics dengan unsur kekerasan, sehingga negara akan membutuhkan lebih banyak cost untuk pencapaian kepentingannya.

Menurut Agil Valiyev, ekonomi, politik dan sosial adalah satu kesatuan yang berperan penting dalam sebuah kebijakan negara, tidak terkecuali pula budaya.²⁵ Sebab saat ini, budaya merupakan salah satu alat penting dalam hubungan internasional sebab globalisasi dan kemudahan teknologi yang dapat mencakup seluruh lapisan aktor-aktor dalam HI. Sebagai contoh, industri budaya yang semakin merambah, membuat budaya tidak bisa lepas dari ekonomi, sebab industri tersebut akan membuat lapangan kerja yang luas dan tentu membutuhkan pasar untuk produk budaya yang dihasilkan. Di sinilah nantinya peran dari diplomasi budaya yang membantu pencapaian kerja sama antar negara dengan terciptanya negosiasi dan kesepakatan dalam kerja sama tersebut.

Diplomasi kebudayaan juga bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional, yakni membangun dukungan dari luar negara untuk pencapaian ekonomi dan politik.²⁶ Untuk pencapaian tujuan tersebut, diplomasi kebudayaan berperan untuk menciptakan rasa sepeham atas masyarakat internasional dengan negara. Upaya-upaya dalam diplomasi kebudayaan ialah memahami, mempengaruhi dan menginformasikan bangsa untuk internasional. Dengan melakukan diplomasi kebudayaan, segala aspek bisa dengan baik terpenuhi dengan membangun citra dan saling pengertian yang berdampak positif. Sebab, diplomasi kebudayaan sendiri bersifat soft power yang lebih halus dan meminimalisir cost.

Unsur-unsur dalam diplomasi kebudayaan biasanya bersifat bahasa dan kesenian, sehingga tidak jauh-jauh dari dua komponen tersebut. Dalam pelaksanaannya diplomasi kebudayaan tidak dapat berdiri sendiri, ia membutuhkan pelaku atau aktor yang berperan di dalamnya. Tidak berbeda dengan diplomasi publik, pelaku atau aktor yang berperan ialah pemerintah dan non-pemerintah,

²⁵ Agil Valiyev. (2017). *Connection Between Economics, Culture and Cultural Diplomacy*. ICCS, Annals of Spiru Haret University. Hal 67-70.

²⁶ Liang Xu. (2014). Hal 1-2.

yakni individu maupun masyarakat, bisa pula actor-aktor lain diluar yang disebutkan. Publik merupakan sasaran utama dalam diplomasi kebudayaan karena melibatkan banyak aktor dan pelaku, sehingga tidak bisa hanya fokus pada satu aktor saja, seperti negara.

Penyebaran kebudayaan pun harus bisa mempengaruhi pendapat khalayak umum agar bisa tercapainya kepentingan nasional yang diinginkan. Jak-Japan Matsuri sebagai sebuah festival pertukaran budaya antara Indonesia dan Jepang memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak negara untuk memperkenalkan jati diri negaranya melalui budaya yang mereka miliki.

Diplomasi Budaya dapat dibedakan menjadi 2 jenis yaitu secara mikro dan makro. Diplomasi budaya mikro merupakan diplomasi yang sering di dengarkan oleh masyarakat awam seperti adanya pertukaran delegasi dalam hal kesenian antar negara. sedangkan untuk diplomasi budaya makro merupakan diplomasi budaya dengan makna lebih luas yang meliputi ideologi, nasionalisme atau globalisasi.²⁷

Dalam prakteknya, diplomasi budaya memiliki dua versi. Pertama, diplomasi budaya hanya menyangkut pemanfaatan kebudayaan untuk mendukung pelaksanaan politik luar negeri. Dalam hal itu diplomasi budaya harus dibedakan dari pemanfaatan kebudayaan di luar kerangka politik luar negeri, misalnya untuk kepentingan pariwisata. Kedua, manfaat diplomasi budaya baik dalam praktik politik luar negeri maupun kepentingan pariwisata atau dengan kata lain pariwisata merupakan bagian dari diplomasi budaya. Dari kedua versi tersebut dapat dilihat bahwa diplomasi budaya dapat dilaksanakan oleh negara tanpa memandang apakah itu negara super power atau negara berkembang.²⁸

Diplomasi Budaya menurut Storey memiliki beberapa makna, antara lain:

- 1) Budaya populer merupakan budaya yang disukai oleh banyak orang. Hal ini tampak dari tingkat penjualan buku, DVD / BlueRay, tingkat kehadiran dalam konser-konser musik, dan festival.

²⁷ Warsito, T, & Kartikasari, W. (2007). *Diplomasi Kebudayaan*. Yogyakarta: Ombak. Hal: 16

²⁸ Harini, S. (2016). *Pelestarian Batik sebagai Perwujudan Nasionalisme dan Alat Berdiplomasi dalam Menghadapi komunitas Sosial Budaya ASEAN*, XXVIII, 358-367. Hal: 4

- 2) Budaya populer dapat dimaknai sebagai budaya yang inferior. Budaya populer dalam hal ini merupakan produk-produk seperti teks, karya atau tindakan yang tidak tergolong dalam high culture. Budaya yang tergolong dalam high culture memiliki sifat eksklusif dan hanya dapat dipahami oleh orang-orang tertentu saja. Sehingga, budaya populer dapat dikatakan sebagai budaya yang inferior.
- 3) Budaya populer sering diartikan sebagai ‘mass culture’ atau budaya massal. Definisi ini sendiri merujuk pada definisi sebelumnya yakni budaya populer merupakan budaya yang disukai oleh banyak orang. Budaya populer berdasarkan definisi ini menegaskan bahwa budaya populer merupakan budaya yang dihasilkan untuk dikonsumsi secara massal.²⁹

Berkembangnya budaya ini tidak lepas dari semakin majunya teknologi internet yang setiap hari semakin berkembang dan masyarakat dapat mengakses informasi dengan lebih cepat. Sulit bagi negara untuk memisahkan hal tersebut, sehingga perlu adanya kebijakan dari pemerintah untuk mengembangkan strategi yang efektif dalam mempromosikan diplomasi budaya menggunakan teknologi informasi beserta kebijakan budaya tersebut.³⁰

Dalam penelitian ini, fungsi dari teori diplomasi budaya adalah untuk melihat perkembangan diplomasi budaya Jepang melalui salah satu budayanya yaitu film anime. Peneliti melihat diplomasi budaya Jepang merupakan cara efektif untuk menarik minat bangsa lain atau meningkatkan pemahaman positif dari dunia internasional terhadap negara Jepang.

2.2.4 Soft Power

Dalam pergaulan internasional, Jepang telah lama dikenal sebagai salah satu negara industri maju dengan sistem ekonomi yang kuat. Dengan penguasaan teknologi yang canggih, Jepang mampu mengembangkan industri otomotif dan manufaktur lainnya yang mampu menguasai pasar dunia. Kekuatan ekonomi Jepang tersebut telah menjadikan Jepang sebagai negara yang memiliki pengaruh

²⁹ Storey, J. (2010). *Cultural Theory and Popular Culture*. London: Pearson Longman. Hal: 13

³⁰ Kim, H. (2011). *Cultural Diplomacy as the Means of Soft Power in an Information Age*. Hal: 12

besar dalam perekonomian dunia. Berbeda dengan pengaruh besar Jepang dalam bidang ekonomi dan industri otomotif serta elektronik yang dianggap sebagai bentuk hard power, pengaruh Jepang dalam bidang budaya populer yang telah banyak menarik perhatian tersebut merupakan suatu bentuk dari soft power. Budaya populer Jepang yang saat ini telah diterima dengan baik oleh masyarakat di negara lain tanpa adanya paksaan dalam penerimaannya, bersifat lebih "lunak" bila dibandingkan dengan pengaruh Jepang lainnya seperti pada bidang ekonomi dan teknologi.³¹

Saat ini istilah soft power sering didiskusikan oleh akademisi maupun praktisi hubungan internasional. Konsep soft power pertama kali diperkenalkan oleh Joseph S. Nye Jr., seorang mantan dekan Kennedy School of Government, Harvard University. Ia menjelaskan soft power sebagai kemampuan suatu negara untuk mencapai tujuannya dengan lebih menggunakan daya tarik (attraction) dari pada paksaan (coercion) dan pembayaran (payment). Salah satu bentuk daya tarik (attraction) tersebut adalah daya tarik dari budaya negara tersebut.³² Definisi soft power menurut Nye yaitu:

*"Soft power is the ability to get what you want through attraction rather than coercion or payments. It arises from the attractiveness of a country's culture, political ideals, and policies."*³³

Menurut Nye, soft power bergantung kepada kemampuan negara untuk mengatur agenda politik dalam cara yang bisa menjadi pilihan (preference) bagi negara lainnya. Salah satu cara untuk memberikan preferensi pada negara lain tersebut adalah melalui daya tarik budaya yang atraktif, ideologi dan institusi. Berbeda dengan kekuatan militer atau kekuatan ekonomi yang digunakan untuk "memaksa" negara lain mengubah pandangan atau posisinya, soft power lebih menekankan pada kemampuan suatu negara untuk mencapai kepentingannya

³¹ Yolana Wulansuci. (2010). *Budaya Populer Manga dan Anime Sebagai Soft Power Jepang*. Skripsi Universitas Indonesia. Hal: 6

³² Ibid. Hal: 6-7

³³ Joseph S. Nye Jr. (2004) *Soft Power The Means to Success in World Politics*. New York: Public Affair. Hal: 10

terhadap negara lain dengan menggunakan pengaruh budaya, nilai politis, dan kebijakan luar negerinya.

Dalam konteks Jepang, salah satu daya tarik budaya yang dimilikinya adalah budaya populer yang dapat dimanfaatkan sebagai soft power negaranya. Nye mengungkapkan bahwa Jepang memiliki sumber-sumber soft power yang lebih potensial dibandingkan dengan negara-negara di Asia lainnya. Salah satu sumber soft power tersebut adalah budaya populer Jepang yang tetap menjadi sumber soft power yang potensial bahkan setelah ekonominya melemah.³⁴

*“Japan has more potential soft power resources than any other Asian countries. Japan’s popular culture was still producing potential soft power resources even after its economy slowed down.”*³⁵

Di antara berbagai bentuk budaya populer Jepang, manga dan anime telah lama dikenal dan memiliki penggemar yang sangat banyak di seluruh dunia dan dianggap sebagai bagian kunci dari budaya populer Jepang. Telah banyak judul manga yang diterjemahkan ke berbagai bahasa lain dan dibaca oleh banyak orang. Sama seperti manga, anime juga telah ditayangkan di banyak negara di dunia dan berhasil meraih popularitas. Seiring perkembangannya, tema yang diangkat ke dalam manga dan anime juga semakin beragam, sehingga dapat dinikmati oleh semua kalangan dari berbagai usia. Kepopuleran manga dan anime di seluruh dunia juga dianggap sebagai bukti kekuatan ekspresif (*expressive strength*) yang dimiliki oleh seniman Jepang.³⁶ Karena kepopuleran global yang dimiliki oleh manga dan anime, pemerintah Jepang pun mendorong pengembangan manga dan anime sebagai salah satu ekspor budaya utama Jepang.³⁷ Keseriusan pemerintah Jepang dalam mengembangkan manga dan anime ditujukan dengan disetujuinya permintaan dari Kyoto Seika University untuk mendirikan School of Cartoon and Comic Art oleh Kementerian Pendidikan, Olahraga, dan Budaya Jepang pada tahun 1999 dan mulai beroperasi pada tahun 2000. Kyoto Seika University menjadi

³⁴ Yolana Wulansuci. (2010). *Budaya Populer Manga dan Anime Sebagai Soft Power Jepang*. Skripsi Universitas Indonesia. Hal: 7

³⁵ Joseph S. Nye Jr. (2004) *Soft Power The Means to Succes in World Politics*. New York: Public Affair. Hal: 85-86

³⁶ Mark W. MacWilliams. (2008). *Japanese Visual Culture*. New York: M.E. Sharpe. Hal: 15

³⁷ Ibid.

universitas pertama yang memiliki departemen seni komik dan kartun di Jepang. Sebagai tambahan, pada tahun 2000 White Paper of Education dari Kementerian Pendidikan, Olahraga, dan Budaya Jepang juga mencatat bahwa manga adalah suatu bentuk komunikasi kontemporer yang sangat penting.³⁸ Pada tahun 2007 diselenggarakan International Manga Award yang memberikan penghargaan kepada penulis manga yang berasal dari luar Jepang.

2.2.5 Konsep Hubungan Bilateral

Hubungan bilateral (Inggris: bilateral relations atau bilateralism) adalah suatu hubungan politik, budaya, dan ekonomi di antara dua Negara. Kebanyakan kerjasama internasional dilakukan secara bilateral, misalnya perjanjian politikekonomi, pertukaran kedutaan besar, dan kunjungan antar negara. Hubungan bilateral hanya melibatkan dua negara, karena bi artinya adalah dua.

Hubungan bilateral yaitu bentuk hubungan kerjasama (diplomatis) antara satu Negara (NKRI) dengan Negara atau blok Negara lainnya, yang mana Negaranegara sahabat tersebut berada di benua yang berbeda. Misalnya kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Negara-negara eropa (Belanda, Jerman, Perancis, dst), Amerika, Vatikan dan lainnya.

Manfaat untuk mengadakan hubungan luar negeri dengan negara lain tentu lebih baik ketimbang bersikap konfrontatif dengan negara tersebut. Adanya perbedaan kepentingan dan kebijakan luar negeri suatu negara sering menjadi pemicu ketegangan atau bahkan konflik antar negara. Di dalam hubungan internasional hubungan yang melibatkan dua negara disebut hubungan bilateral. Hubungan ini mencakup beberapa bidang termasuk aspek ekonomi, politik, militer, dan pertahanan keamanan. Menurut Kusumohamidjoyo hubungan bilateral diartikan Suatu bentuk kerjasama diantara kedua negara baik yang berdekatan secara geografis ataupun yang jauh diseberang lautan dengan sasaran utama untuk menciptakan perdamaian dengan memperhatikan kesamaan politik, kebudayaan, dan struktur ekonomi.

³⁸ Ibid. Hal: 46

Jadi dalam kerjasama bilateral antara dua negara letak geografisnya yang saling berjauhan tidak lagi menjadi hambatan yang cukup berarti. Perkembangan yang menakjubkan telah memungkinkan semua itu. Semakin tingginya saling ketergantungan antara negara satu dengan yang lain telah menjadikan letak geografis yang berjauhan tidak lagi menjadi penghalang yang berarti. Hubungan antar dua negara bisa dilakukan dalam berbagai bidang kehidupan manusia seperti; bidang ekonomi, politik, militer dan kebudayaan. Hubungan akan terjalin sesuai dengan tujuan-tujuan spesifik serta bidang-bidang khusus yang dijadikan tolak ukur bagi suatu negara dalam melakukan hubungan dengan negara lain. Dalam hubungan tersebut sangat ditentukan oleh hasil interaksi kedua negara dalam berbagai bidang.

Dilaksanakannya kerjasama bilateral antar dua negara dirasakan akan sangat penting artinya, oleh karena suatu negara tidak dapat memenuhi semua kebutuhannya tanpa kerjasama dengan negara lain. Pemanfaatan modal dasar berupa SDA (Sumber Daya Alam) dalam pencapaian tujuan dan kepentingan nasional itu mutlak dilakukan, namun keterbatasan akibat perbedaan letak geografis, keadaan iklim dan luas wilayah negara tidak dapat dihindari. Inilah yang disebut sebagai “endowment factor” yang lebih merupakan anugerah Tuhan terhadap negara tersebut.

Suatu negara dalam interaksinya dengan negara lain akan mengacu pada kemampuan dan kekurangan yang dimilikinya. Terdapat negara yang kaya akan sumber daya alam namun tidak memiliki kemampuan untuk mengolahnya, sementara di pihak lain ada negara yang miskin akan sumber daya alam namun memiliki kemampuan teknologi untuk mengolahnya, dengan adanya perbedaan tersebut maka kemungkinan untuk berinteraksi dalam kerangka kerjasama sangat besar dimana hasil kerjasama tersebut akan membawa dampak yang luas bagi kehidupan bangsa negara itu.

Pola interaksi timbal balik antara dua negara dalam hubungan internasional di definisikan dengan hubungan bilateral. Hubungan bilateral sebagai suatu konsep dalam ilmu hubungan internasional, mempunyai makna yang lebih kompleks dan lebih beragam serta mengandung sejumlah pengertian yang berkaitan dengan dinamika hubungan internasional itu sendiri. Dalam kamus politik internasional,

hubungan bilateral secara sederhana dijelaskan sebagai, "...keadaan yang menggambarkan adanya hubungan saling mempengaruhi atau terjadi hubungan timbal balik antara dua pihak (dua negara)". Batasan seperti ini mengandung maksud bahwa hubungan bilateral merupakan hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antara dua negara. Terdapat beberapa bidang yang meliputi hubungan bilateral ini, dimana yang paling umum adalah bidang perdagangan, pendidikan dan sosial budaya, politik bahkan pertahanan keamanan.

Istilah bilateral atau hubungan bilateral adalah untuk mengasumsikan hubungan yang terjadi antara dua negara yang baik berdekatan maupun berjauhan secara geografis seperti yang di kemukakan oleh Kusumo Hamidjojo tentang hubungan bilateral sebagai berikut:

Hubungan bilateral adalah suatu bentuk kerjasama diantara negara-negara, baik yang berdekatan secara geografis ataupun yang jauh di seberang lautan, dengan sasaran untuk menciptakan perdamaian dengan memperhatikan kesamaan politik, kebudayaan dan struktur ekonomi.

Terselenggaranya hubungan bilateral juga tidak terlepas dari tercapainya beberapa kesepakatan antara dua negara yang melakukan hubungan yang mana mereka mengabdikan pada kepentingan nasionalnya dalam usaha untuk menyelenggarakan politik luar negerinya masing-masing. Dengan tujuan nasional yang ingin dicapai suatu bangsa dapat terlihat dari kepentingan nasional yang dirumuskan oleh elit suatu bangsa. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Plano dan Olton bahwa: "*Hubungan kerjasama yang terjadi antara dua negara didunia ini pada dasarnya tidak terlepas dari kepentingan nasional masing-masing negara. Kepentingan nasional merupakan unsur yang sangat vital yang mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan, militer, dan kesejahteraan ekonomi*".

Selanjutnya, dalam kamus politik internasional, Didi Krisna mendefinisikan konsep tentang hubungan bilateral adalah sebagai berikut, bahwa "*hubungan bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau terjadi hubungan timbal balik antara dua belah pihak (dua negara)*".

Hubungan bilateral yang dimaksud adalah kerjasama dibidang ideologi, politik, ekonomi, hukum, keamanan. Adapun menurut Holsty dan Azhary tentang variabel-variabel yang harus diperhitungkan dalam kerjasama bilateral adalah: 1. Kualitas dan kuantitas kapabilitas yang dimiliki suatu negara. 2. Keterampilan mengerahkan kapabilitas tersebut untuk mendukung berbagai tujuan. 3. Kredibilitas ancaman serta gangguan. 4. Derajat kebutuhan dan ketergantungan. 5. Responivitas di kalangan pembuat keputusan.

Hubungan bilateral mengandung dua unsur pemaknaan, yakni: konflik dan kerjasama. Antara keduanya memiliki arti yang saling bergantian tergantung dari konsep apa yang ditawarkan antara kedua negara menurut motivasi-motivasi internal dan opini yang melingkupinya. Serta terbiannya hubungan bilateral yang diupayakan oleh suatu negara dengan negara lain dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan diantara keduanya. Seperti yang dikemukakan oleh Coplin bahwa: Melalui kerjasama internasional, negara-negara berusaha memecahkan masalah sosial, ekonomi, dan politik. Tipe yang pertama menyangkut kondisi-kondisi di lingkungan internasional yang apabila tidak diatur akan mengancam negara-negara yang terlibat. Tipe kedua mencakup keadaan sosial, ekonomi, dan politik domestik tertentu yang dianggap membaawa konsekuensi luas terhadap sistem internasional sehingga dipersepsikan sebagai masalah internasional bersama.³⁹

Selanjutnya dalam konsepsi ideal pengambilan keputusan politik luar negeri senantiasa memperhatikan nilai-nilai ideal, yaitu membentuk sistem yang lebih menawarkan pola dan tata cara hidup politik dalam arti seluas-luasnya, bebas dari kekurangan materil serta bebas untuk mengembangkan nilai-nilai dan martabat kemanusiaan.⁴⁰ Dalam kaitannya dalam rationality dan foreign policy, bahwa perwujudan atau penentu sasaran, objek atau mitra hubungan merupakan pilihan yang rasional dengan memperhhitungkan sirkumstansi internasional posisi politik dipentas internasional. Oleh karena itu hal ini sangat penting untuk diperhatikan

³⁹ William Coplin. (2003). *Pengantar Politik Internasional Suatu Telaah*. Terjemahan Mercedes Marbun. Hal: 43-44.

⁴⁰ Sudarsono. (1998). *Remunerasi dalam Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Universitas Terbuka. Hal 607.

dari efisiensi dan tujuan yang ingin dicapai.⁴¹ Adapun sisi lain yang dapat ditimbulkan dari adanya hubungan bilateral adalah bias jadi mengaandung makna konflik dan kerjasama.

Penggambaran tentang hubungan bilateral tersebut tidak lepas dari kepentingan nasional masing-masing negara untuk mengadakan hubungan dan menjalin kerjasama antara kedua negara, dan tidak tergantung hanya pada negara dekat saja melainkan juga negara yang jauh letaknya secara geografis. Dengan adanya tujuan-tujuan tertentu untuk menciptakan perdamaian dengan memperhatikan kerjasama politik, kebudayaan dan struktur ekonomi sehingga menghasilkan suatu hubungan yang lebih harmonis diantara kedua negara. Dapat dikatakan bahwa hubungan tersebut tidak lepas dari adanya hubungan yang saling mempengaruhi yang memuat reciprositas atau adanya hubungan timbal balik antar dua pihak (dua negara).

Dua negara yang menjalin kerjasama bilateral ini tentu mengharapkan keuntungan. Kerjasama akan melahirkan kesepakatan bersama berupa ketentuanketentuan yang harus dipatuhi bersama bagi terjadinya harmonisasi hubungan diantara keduanya. Tentunya kesepakatan-kesepakatan yang telah dilahirkan merupakan kebijakan yang akan memberi keuntungan bagi kedua negara yang bekerjasama sesuai dengan tujuan dari masing-masing negara yang hendak dicapainya.

⁴¹ Paul R Viottiand Mark A. Kauppi. (1998). *International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism*. Pearson Education, Inc. Hal: 547.

2.3 Skema Kerangka Penelitian

Adapun skema kerangka penelitian “Peran Diplomasi Budaya Jepang Melalui Serial Manga dan Anime Terhadap Hubungan Bilateral Dengan Indonesia Pada Tahun 2016-2021”. Sebagai berikut:

